

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG BERSTATUS MENJADI SENGKETA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 390K/Pdt/2016)

FEBRIAN WARDHANA, S.H.

fbrnw31@gmail.com

Penelitian ini mengambil pada studi kasus perkara perdata Nomor 390K/Pdt/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan selanjutnya mengkaji tentang dasar pemikiran yang dibangun oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 390K/Pdt/2016, terhadap pembatalan Akta Hibah dari orang tua kepada anaknya yang dibuat di hadapan Notaris, serta pelaksanaan putusan hakim terkait dengan pembatalan akta hibah dan tentang perlindungan hukum terhadap debitur terhadap jaminan hak tanggungan yang menjadi sengketa, dimana ketika suatu jaminan yang sudah dibebani hak tanggungan itu menjadi sengketa karena peralihan hak sebelumnya yang mengalami sengketa. Peralihan hak dalam hak atas tanah haruslah sesuai dengan proses hukum yang benar sehingga ketika hak atas tanah tersebut dijaminan kepada pihak kreditur, hak atas tanah tersebut akan bersih dari sengketa di kemudian hari. Penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah baik melalui litigasi maupun non-litigasi sering ditemukan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tersebut dirasa tidak berkeadilan.

Seperti yang dialami pada kasus ini dimana tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa faktor penyebab munculnya masalah sengketa tanah dalam kasus ini antara lain adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan sepihak dimana menghilangkan status saudara lainnya sehingga kehilangan hak warisnya dikarenakan peralihan hak dengan Akta Hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuan saudara lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa. Hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut menjadi jaminan pihak kreditur dimana debitur telah wanprestasi dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga akan di lakukan penjualan secara lelang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penggugat yakni mengajukan gugatan kepada pengadilan atas hilangnya hak mereka dari tanah tersebut dan memperoleh hak mereka atas tanah sengketa tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Deditur, Jaminan Hak Tanggungan, Hibah

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TO CREDITURE TO THE WARRANTY OF CHANGED LIVING RIGHTS STATUS BECOME A DISCLOSURE (DECISION ANALYSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA SUPREME COURT NUMBER 390k/Pdt/2016)

FEBRIAN WARDHANA, S.H.

fbrnw31@gmail.com

This research takes on case study of civil case Number 390K / Pdt / 2016. The purpose of this study is to know and further examine the rationale constructed by the judge in the Supreme Court Decision with the number: 390K / Pdt / 2016, against the cancellation of the Deed of Grant from the parents to their child which made it in the Notary, as well as the implementation of the related judge's decision with the cancellation of the deed of grant and about legal protection against debtor collateral guarantee rights in dispute, when a guarantee which has been encumbered by the mortgage right becomes a dispute due to the transition of the previous rights which has been disputed. The transfer of land right must be in accordance with the correct legal process so that when the land rights are secured to the creditor, the land right will be cleared from disputes in the future. Law enforcers in resolving land rights disputes through litigation or non-litigation are often found that in resolving the dispute it is deemed unfair.

As experienced in this case where it is not in accordance with applicable legal provisions. That the cause of the problem of land disputes in this case is the unlawful act that eliminates the status of other siblings and thus loses the right of inheritance due to the transfer of rights with the Grant Deed conducted without the knowledge of other siblings consequential in a dispute. The Land Right in dispute are guaranteed by the creditor where the debtor has defaulted and can not fulfill its obligations so that it will be sold in auction. While the efforts made by the plaintiff are to file a lawsuit to the court for the loss of their rights from the land and obtain their rights on the land of the dispute.

Keywords: *Legal Protection, Debtor, Deposit Insurance, Grant*